



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak dibentuknya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 telah menetapkan banyak Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam perkembangannya beberapa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak dilaksanakan karena tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 1

Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku:

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1950 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pemeriksaan Tuberculinasi Pada Sapi-Sapi Perahan. (Warta Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1951 Seri A 1 Nomor 3);
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perhitungan Ternak Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1951 tentang Sumpah Atau Janji Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Warta Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1951 Seri A 1 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1953 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 1952 Hal "Hukum Jabatan" Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1953 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Kedudukan Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1953 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemeriksaan Dan Timbangan Hewan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1953 tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Sumpah Dan Janji Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1953 Seri A 3 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1954 tentang Pemberian Istirahat Karena Hamil (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1954 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Kesehatan Kepada Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Daerah-Daerah Otonom Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 24/1953 Hal Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Kewajibannya Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1955 tentang Pemberian Uang Duka/Biaya Perawatan Kepada Petugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Mendapat Kecelakaan. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1955 tentang Penghapusan Uang Duka/Beaya Perawatan Kepada Petugas Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Peraturan Daerah Rijksblad Kasultanan Pakualaman Juga Mengatur Urusan Karaton Yogyakarta/Puro Pakualaman. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1955 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1955 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 14/1952 Hal Pemberian Pengganti Kerugian Barang Bergerak Yang Hilang Rusak Akibat Peristiwa Luar Biasa Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 12/1952 Tentang Penghasilan Dan Usaha Pegawai Negeri Dalam Lapangan Partikelir Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pemberantasan Hama Tupai. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pemberantasan Hama Artona Catoxantha sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 12 Tahun 1960. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 27/1954 Hal Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri, Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pemungutan Tol Atau Pemungutan Lainnya Semacam Tol;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 59/1951 Hal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tetap Pengawal-Pengawal Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 13/1952 Hal Pemberian Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil Untuk Barang-Barang Yang Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Pada Waktu Melakukan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai-Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1956 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 28/1950 Hal Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Buat Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai-Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 33/1955 Hal Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 1956 tentang Surat Keterangan. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Seri A Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 1956 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 9/1952 Hal Susunan Pangkat Dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 23 Tahun 1956 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 10/1952 Hal Daftar Penyataan Kecakapan Pegawai Negeri Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 1956 tentang Petunjuk Bagi Panitia Sempadan. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 29);
28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pedoman Penetapan Daerah Sempadan Serta Daerah Pengaruhnya Dan Jalur Sempadan. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 1956 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pegawai Buruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960 Seri A Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 1956 tentang Panitia Pengairan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Seri A Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1957 tentang Persediaan/Peredaran Bahan Makanan Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 15/1951 Hal Peraturan Yang Mengatur Penghasilan Pegawai Warganegara Yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Seri A Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 47/1952 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 36/1954 Hal Pemberian Tunjangan Kemahalan Dearah Dan Keluarga Kepada Penerima Pensiun Dan/Atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Seri A Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1957 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor.46/1952 Hal Kenaikan Pensiun Dan Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Yang Diberikan Kepada Pegawai Bekas Pegawai Negeri Sipil Atau/Dan/Anaknya Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Seri A Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 51/1954 Hal Pemberian Tunjangan Istimewa Kepada Keluarga Yang Tewas Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Seri A Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1957 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Provinsi Daerah Pemerintah Nomor.4/1956 Hal Pembebasan Pegawai Negeri Dari Kewajibannya Untuk Membantu Pusat Organisasi Serikat Kerja Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Seri A Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor.10/1957 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor.25/1957 Hal Pemberian Tunjangan Keahlian Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1958 tentang Pembelian Dan Wajib Dijual Padi Oleh/ Kepada Pemerintah. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1958 tentang Pengangkutan Biji Mangan Didalam Dan Keluar Daerah Istimewa Yogyakarta;
40. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintahan Nomor.35/1957 Hal Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 14);
41. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 1958 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor.8/1954 Hal Pemberian Istirahat Dalam Negeri. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1959 seri A Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 1958 tentang Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Pekerjaan-Pekerjaan Bangunan Dalam Bidang Pengairan, Jalan-Jalan Dan Gedung-Gedung Di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 1958 tentang Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Rakyat Nasional Partikelir. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 1958 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor.20/1952 Hal Pensiun Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 15);
45. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1959 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor.8/1952 Hal Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil, Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 19);
46. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pedoman Untuk Dewan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta;
47. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1959 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Pemerintahan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Antar Waktu Masa Duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 17);
48. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 8 Tahun 1959 tentang Pemberian Cuti Dan Perwakilan Jabatan Bagi Pamong-Kelurahan Karena Sakit, Beristirahat, Menjalankan Tugas Negara Atau Sebab Lain-Lainnya. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960 Nomor 4);

49. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 12 Tahun 1959 tentang Upah Pekerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Upah Kerja Borongan. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960 Seri A Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 17 Tahun 1959 tentang Perusahaan Roti. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1964 Seri A Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 1 Tahun 1960 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor.68/1958 Hal Peremajaan Alat-Alat Negara Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 2);
52. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 9 Tahun 1960 tentang Pemungutan Bea Gamping Di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1968 Seri A Nomor 4);
53. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 10 Tahun 1960 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Lapangan Sosial Kepada Daerah Daerah Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo Dan Gunungkidul. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 9);
54. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 13 Tahun 1960 tentang Dana (Fondso Pemberantasan Hama Artona Catoxantha) Di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1968 Seri A Nomor 5);
55. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 14 Tahun 1960 tentang Peraturan Hari Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 10);
56. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 17 Tahun 1960 tentang Penyesuaian Tingkat Bagi Para Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Menduduki Jabatan Kejuruan Tetapi Tidak Mau Atau Belum Memiliki Ijazah Pendidikan Kejuruan Khusus. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 12);
57. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 3 Tahun 1961 tentang Pemberian Nomor Pemeriksaan Dan Mengemudikan Kendaraan Umum Tidak Bermotor. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 15);
58. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 4 Tahun 1961 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor.18/19566 Tentang Penyerahan Premi Kepada Pegawai-Pegawai Yang Pekerjaannya Langsung Berkenaan Dengan Pajak Yang Dipungut Oleh Jawatan Pajak Pajak Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1968 Seri A Nomor 6);
59. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 6 Tahun 1961 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor.20/1961 Hal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1962 Seri A Nomor 1);
60. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 1 Tahun 1962 tentang Pencegahan Terhadap Bahaya Saluran Listrik Arus Kuat Diatas Tanah. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1968 Seri A Nomor 7);
61. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor . 3 Tahun 1964 tentang Pemberantasan Hama Tikus;
62. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 2 Tahun 1968 tentang Perubahan Roda Gerobak Di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1969 Seri A Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 3 Tahun 1971 tentang Dana Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja Harian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1972 Seri A Nomor 3);

64. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Penyerahan Pelaksanaan Pengurusan Jalan-Jalan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Bekas Jalan Perusahaan Pertanian Asing Kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Dan Bantul. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1974 Seri A Nomor 2);
65. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 6 Tahun 1974 tentang Penyerahan Balai Benih Ikan Di Banjaaram Kulibawang Kulonprogo Kepada Lembaga Daerah Kabupaten Kulonprogo. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1979 Seri A Nomor 3);
66. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Pengelolaan Kekayaan Kelurahan Serta Penguasaannya. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1977 Seri C Nomor 2);
67. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 3 Tahun 1975 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1977 Seri D Nomor 90);
68. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 4 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor.18/1960 Tentang Kebun Bibit Desa. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1977 Seri A Nomor 22);
69. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 2 Tahun 1978 tentang Izin Pengambilan Kayu Bakar Dan Daun Jati Pada Hutan Dan Bea Masuk Hutan Wisata Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1987. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1979 Seri B Nomor 3);
70. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 2 Tahun 1980 tentang Tempat Pelelangan Kayu Jati. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1980 Seri B Nomor 1);
71. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 tentang Usaha Ketambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1982 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1989 Seri B Nomor 4);
72. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Instansi Lain Yang Membantu/Berkaitan Dengan Usaha Pemasukan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1986 Seri D Nomor 86);
73. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1987 Seri D Nomor 120);
74. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketentuan Dan Ketentuan Bangunan;
75. Peraturan Daerah Istimewa Provinsi Daerah Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Usaha Kawasan Pariwisata. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1989 Seri B Nomor 2);
76. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1989 tentang Usaha Perkemahan Wisata. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri B Nomor 3);
77. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1989 tentang Mandala Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri B Nomor 4);

78. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama PD. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 2/85 tentang Pungutan Klinik Bersalin PLKM Di Godean Dan RSJ Lali Jiwa Di Pakem. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri B Nomor 6);
79. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1990 tentang Uang Leges. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1991 Seri B Nomor 1);
80. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1990 tentang Biaya Pemakaian Alat-Alat Besar Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri B Nomor 8);
81. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Laport Dan Pembinaan Kesejahteraan Buruh Pekerja Pada Perusahaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1998 Seri B Nomor 1);
82. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan Dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri D Nomor 68);
83. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1991 Seri C Nomor 1);
84. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Dati II. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993 Seri C Nomor 1);
85. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang P Dan K Kepada Dati II. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994 Seri D Nomor 26);
86. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1993 tentang Iuran Pelayanan Irigasi (Ipair) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994 Seri D Nomor 27);
87. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1994 tentang Retribusi Masuk Taman Wisata Alam Plawangan Turgo. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997 Seri B Nomor 1);
88. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997 Seri B Nomor 3);
89. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang Perikanan, Sosial, Ketenagakerjaan, Perkebunan, Kepariwisata, Pekerjaan Umum, Pertambangan, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Kotamadya Daerah TK. II Kabupaten Dati. II Bantul;
90. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Kedalam Air. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1998 Seri B Nomor 1);
91. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengaturan Garis Sempadan Pada Jalan Nasional Dan Jalan Provinsi;
92. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1997 tentang Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Pemborongan Jasa Konsultasi Dan Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Lainnya;
93. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1999 Seri B Nomor 4);

94. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Seri B Nomor 1);
95. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program Dan Kegiatan Transportasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Seri A Nomor 1);

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 JANUARI 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 JANUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

TRI HARJUN ISMAJI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun dan menetapkan kebijakan publik berbentuk Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjalanan panjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional sampai saat ini mengharuskan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengkajian dan penelitian kembali terhadap Produk Hukum Daerah yang sudah tidak sesuai lagi sehingga harus dicabut, disempurnakan/disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencabutan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1950 sampai dengan saat ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tersebut sudah tidak dilaksanakan karena telah ada peraturan perundang-undangan yang baru
2. Tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya
3. Tidak lagi menjadi urusan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Telah menjadi urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai urusan pemerintahan Kabupaten/Kota masing-masing.
5. Untuk memberikan kepastian hukum.

Pencabutan Peraturan Daerah atau penyempurnaan/penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sejak Tahun 1950 tentunya harus segera dilaksanakan, namun dalam implementasinya haruslah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada untuk membawa kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlu ditetapkan adanya Peraturan Daerah yang mencabut berlakunya Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2